

PEMBERIAN IZIN USAHA PERCETAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA

PADANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi gelar

Sarjana Hukum

Oleh :

WANDA OCTARIAN
1010113204

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



Pembimbing I : Dr. Azmi Fendri, S.H., M.H.


Pembimbing II : Titin Fatimah, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

	No. Alumni Universitas:	Wanda Octarian	No. Alumni Fakultas:
	(a) Tempat/ Tgl.Lahir: Bukittinggi / 12 Oktober 1990 (b) Nama Orang Tua: Ali Basyar dan Darmawiyah (c) Fakultas: Hukum (d) PK: Hukum Administrasi Negara (IV) (e) No BP: 10 10 113 204		(f) Tanggal Lulus: 27 Juli 2017 (g) Predikat Lulus: Memuaskan (h) IPK: 3.00 (i) Lama Studi: 3 Tahun 47 Bulan (j) Alamat: Jalan baru, Kec. Pariaman tengah, Kota Pariaman.

**PEMBERIAN IZIN USAHA PERCETAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG
(Studi di Kota Padang Tahun 2016)**

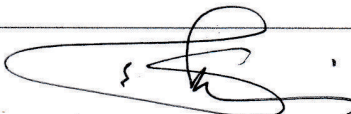
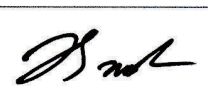
Nama: Wanda Octarian, Nomor Registrasi: 10 10 113 204,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70+ix halaman, 2017

ABSTRAK

Ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengurusan Izin telah terdesentralisakan kepada Pemerintah Daerah sesuai adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah diharapkan agar pemerintahan Daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya. Dalam hal ini penulis berfokus kepada lembaga Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (D PMPTSP). Sehingga hal ini juga memperlihatkan bahwa setiap pengusaha dan perusahaan harus mempunyai Izin usaha, dikarenakan perizinan berkaitan dengan kepentingan yang diinginkan oleh masyarakat dengan tujuan untuk melakukan aktivitas tertentu dengan mendapat persetujuan atau legalitas dari pejabat negara di dalam administrasi pemerintah dalam suatu negara. Tetapi di lain perakteknya masih banyak pengusaha atau perusahaan yang masih tidak memiliki izin usaha. Dari penjelasan di atas maka dapat di tarik perumusan masalah yaitu Bagaimana pemberian izin Percetakan oleh pemerintah kota padang, kedua apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan pemberian izin usaha Percetakan oleh pemerintah kota padang, dan ketiga bagaimana tindakan pemerintah kota padang terhadap pelaku usaha Percetakan yang tidak memiliki izin usaha. Skripsi ini bertujuan untuk merangkum dan melihat seberapa banyak pengusaha Percetakan yang sudah memiliki Izin untuk usahanya dan juga melihat bagai mana cara atau upaya Pemerintah untuk memberikan peringatan atau suatu penyuluhan terhadap pengusaha atau perusahaan yang masih tidak memiliki izin usaha terutama di Kota Padang. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara kepada narasumber yang dianggap memahami ataupun menjadi subjek penelitian. Penelitian ini juga didukung dengan metode yuridis normatif dengan mempertimbangkan sumber data sekunder berupa bahasan tentang pokok ide dari penulis dan literatur lainnya. Dalam penelitian ini di temukan hasil penelitian berupa proses pemberian izin usaha percetakan oleh dinas perizinan Terpadu kota padang dan kendala -kendala dalam proses pemberian izin usaha percetakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kota padang.


Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Juli 2017.
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1. 	2. 
Nama terang	<u>Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H.</u>	<u>Hendria Fithrina, S.H., M.H.</u>

Mengetahui,

Ketua Bagian Tata Negara: **Syofiarti, S.H., M.Hum.**


Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumni:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	TandaTangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	TandaTangan: